RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA-OPD) T.A. 2020

BIRO ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2019

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020

BAB. I.	PENDAHULUAN.	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	1
	C. Maksud dan Tujuan	3
	D. Sistematika Penulisan	4
BAB. II.	EVALUASI PELAKSANAANRENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2018	5
	A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Biro Organisasi	5
	B. Analisis Pelayanan Kinerja Biro Organisasi	37
	C. Isu-Isu Penting Peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi	39
	D. Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah	40
	E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB. III.	TUJUAN DAN SASARAN	
	A. Telaahan terhadap kebijakan nasional	51
	B. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Biro Organisasi	51
BAB. IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB. V.	PENUTUP	74

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561)730062

P O N T I A N A K

Kode Pos 78124

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARJANI, SE, M.Si

NIP : 19660302 198703 1 012

Jabatan : Kepala Biro Organisasi

Instansi : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar

Dengan ini menyatakan bahwa, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 hasil penyelarasan dan verifikasi dengan RKPD Provinsi Kalimantan Barat telah disesuaikan dengan hasil verifikasi bersama Tim Verifiktor dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Agustus 2019

Kepala Biro Organisasi,

MARJANI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660302 198703 1 012

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalbar Tahun 2018-2023, dimaksudkan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan. Arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD dijadikan pedoman oleh Biro Organisasi sebagai acuan dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2020 guna sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja digunakan untuk mengimplementasikan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja sebagai alat sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kebijakan umum APBD ditetapkan bersama–sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Oleh sebab itu Rencana Kerja menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik.

B. LANDASAN HUKUM.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalbar Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 69).

.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai maksud :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organsasi Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

D. SISTEMATIKA PENULISAN.

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 b

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematik penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2017

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja, pelayanan perangkat derah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta Program Kerja dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV ROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat Rencana Kerja dan besaran anggaran sesuai dengan pagu indikatif tahun 2020

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BIRO ORGANISASI TAHUN 2018

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2018, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.654.670.850,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.536.972.700,00 atau 95,57%. Anggaran tersebut merupakan anggaran Belanja Langsung sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung dilingkungan Sekretariat Daerah dialokasikan terpusat pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun 2018, pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar terdapat 8 (delapan) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapai tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1.1. Penyediaan Jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional
1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
1.2. Penyediaan Makanan dan Minuman;
1.3. Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah;
1.4. Penataan dan Pemeliharaan Arsip.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Biro Organisasi. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain :

2.1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional;
2.2. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin;
2.3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini ditetapkan dengan maksud agar Biro Organisasi memiliki Sumber Daya Manusia yang bermutu (berkualitas), mampu bersaing dengan sumber daya lain, sehingga mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusianya. Dalam program ini terdpat beberapa kegiatan, antara lain :

3.1. Pendidikan dan Pelatihan;
3.2. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop;
3.3. Pembinaan Jasmani dan Rohani;
3.4. Penyusunan Analisis Jabatan;
3.5. Penyusunan Penetapan Kinerja.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini ditetapkan dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan system pelaporan keuangan dan kinerja pada Biro Organisasi Setda Prov.Kalbar sehingga tercapai tertib administrasi keuangan dan pelaporan kinerja. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain :

4.1. Penyusunan Laporan Keuangan;
4.2. Penyusunan LAKIP;
4.3. Penyusunan RENSTRA;
4.4. Penyusunan RENJA SKPD;
4.5. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ;
4.6. Penyusunan RKA dan DPA SKPD.

5. Program Penataan Kelembagaan Pemeritahan Daerah

Program ini terdiri dari 6 (Enam) kegiatan, yaitu :

5.1. Pengembangan wawasan dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.

Maksud kegiatan pengembangan wawasan dalam rangka penataan kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan konseptual staf dalam menyusun dan merumuskan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan pelaksanaan program pengembangan wawasan dalam rangka penataan kelembagaan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik oleh Pejabat Struktural/Staf di lingkungan Biro Organisasi dengan melakukan pembelajaran.

Kegiatan ini telah dilakukan pada 2 (dua) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada bulan April dan September 2018.

5.2. Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Maksud dan tujuan kegiatan Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, regional dan daerah dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, efektif dan efisien dengan

tujuan terwujudnya penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini telah tersusun suatu laporan hasil koordinasi penataan kelembagaan perangkat daerah. Hasil laporan tersebut antara lain terciptanya persamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menindaklanjuti permasalahan-permasalahan di bidang organisasi. Selanjutnya adanya arahan dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi yang berkaitan dengan bidang organisasi antara pusat dan daerah.

5.3.Penyusunan Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar

Maksud dan Tujuan kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan tujuannya agar perangkat daerah provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat berjalan dengan lancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini telah ditetapkannya beberapa Peraturan Gubernur Perubahan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 yaitu :

1) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2) Sekretariat DPRD Provinsi kalbar
3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar
4) Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar
5) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar
6) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar
7) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Kalbar
8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalbar
9) Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar
10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar
11) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar
12) Dinas Sosial Provinsi Kalbar
13) Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar

14) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar
15) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar

5.4. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota.

Maksud kegiatan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat Daerah Kabupaten/Kota merupakan bentuk pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Tujuan pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pembentukan susunan perangkat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Kegiatan tersebut telah dilakukan terhadap para Pejabat Struktural/Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Bahan dan informasi yang digunakan dalam penyusunan perumusan kebijakan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.

5.5. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar

Maksud diadakannya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dibidang organisasi.

Tujuan diadakannya Rapat Koordinasi Teknis ini adalah agar tercipta sinkronisasi kebijakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur, antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sekadau pada tanggal 18 s.d 20 April 2018. Adapun hasil dari kegiatan ini Laporan tantang pelaksanaan kegiatan berupa :

a. Terinventarisirnya berbagai permasalahan dibidang organisasi.

b. Tersusunnya rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan dibidang organisasi.

c. Terciptanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penataan organisasi.

5.6. Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat

Maksud dan Tujuan kegiatan monitoring, evaluasi tugas pokok dan fungsi UPT di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan dalam rangka penataan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dipandang perlu melakukan monitoring evaluasi tugas pokok pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil kegiatan yang dilakukan adalah tersedianya data dan informasi berkaitan dengan hasil monitoring dan evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 dan laporan hasil monitoring dan evaluasi tugas pokok dan fungsi UPT di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

6. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.

Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan, yaitu :

6.1. Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.

Maksud diselenggarakannya Asistensi Standar Operasional Prosedur (SOP)Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai upaya kongkrit perbaikanproses kinerja organisasi pemerintah yang akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta membantu perwujudan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif. Selain itu juga untuk membantu terbentuknya semangat profesionalisme dikalangan aparatur pemerintah.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana SOP yang telah dibuat atau disusun sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang dapat memberikan panduan bagi seluruh instansi Pemerintah Daerah khususnya instansi-instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan SOP, semua SKPD mengikuti kegiatan tersebut. Namun hanya terdapat 20 (dua puluh) SKPD yang sudah menyampaikan Draft SOP ke Biro Organisasi dan telah dikoreksi untuk selanjutnya dikembalikan ke SKPD masing-masing untuk di perbaiki.

6.2. Monev Penataan Ketatalaksanaan pada Kabupaten/Kota.

Maksud dilaksanakannya monitoring dan evaluasi bidang Ketatalaksanaan adalah sebagai salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar serta untuk meningkatkan kinerja melalui inventarisasi data mengenai pelaksanaan kebijakan dibidang ketatalaksaan, yang nantinya akan menjadi bahan pengambilan kebijakan menuju terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi bidang Ketatalaksanaan ini adalah :

a. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan
   bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
b. Memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan peraturan - peraturan bidang ketatalaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Pelaksanaan Monev Penataan ketatalaksanaan dilakukan terhadap 4 (empat) Kabupaten/Kota. Monev dilakukan terhadap implementasi peraturan dibidang Ketatalaksanaan antara lain : Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Ke-empat Kabupaten/Kota yang dilakukan Monev antara lain : Kab. Sekadau, Bengkayang, Landak dan Kab. Kayong Utara.

6.3. Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan ini adalah untuk memberikan pedoman atau acuan mengenai Pengaturan penggunaan Pakaian Kerja di lingkungan Pemprov. Kalbar agar tercipta keseragaman dalam menggunakan pakaian Dinas di lingkungan Pemprov. Kalbar.

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan bidang Ketatalaksanaan telah dilakukan beberapa kali pembahasanmelalui rapat Tim dan dari hasil pembahasan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian

Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov. Kalbar yang mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

6.4. Fasilitasi Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyusunan Laporan Pencapaian Penerapan SPM dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah khususnya Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga pada akhirnya terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya penerapan SPM di Daerah yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pelaporan.Sehingga kedepan diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara utuh mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan mengevaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya. Laporan Pencapaian SPM ini nantinya akan menjadi bahan kajian untuk menetapkan kebijakan guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan penerapan SPM adalah :

a. Memonitor perkembangan penerapan SPM di Provinsi Kalbar
b. Memonitor perkembangan penerapan masing-masing bidang SPM di Provinsi Kalbar.

Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut :

1) Nilai capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalbar tahun 2017 adalah 53,75 %. Hal ini merupakan nilai dari penerapan SPM Pemprov yaitu 83,16 % dan nilai penerapan SPM Kabupaten/Kota yaitu 48,50 %, (hasil rekapitulasi terlampir);
2) Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik rapat teknis 6 bidang SPM maupun rapat teknis dengan menghasilkan masukan-masukan, saran dan pertanyaan terkait penyusunan laporan SPM Provinsi Kalbar Tahun 2017

Terdapat 6 Bidang SPM untuk Provinsi, yaitu Bidang Pendidian, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota juga terdapat 6 (enam) Bidang SPM yang menjadi dasar perhitungan pencapaian SPM.

Dari hasil rapat fasilitasi penyusunan SPM telah tersusun dokumen laporan hasil penyusunan SPM untuk Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

6.5. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Barat.

Maksud dari Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini adalah :

a. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
b. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
d. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan sehingga Masyarakat dapat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini adalah:

a. Mendorong dan memotivasi unit-unit pelayanan di Prov. Kalbar agar selalu dapat menjaga dan meningkatkan fungsi pelayanannya kepada masyarakat, dengan melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyaraka penerima layanan terhadap kinerja pelayanan yang ada pada unit yang bersangkutan;

b. Data SKM dimaksud selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan demikian diharapkan kedepan kebijakan peningkatan pelayanan publik yang akan diambil dapat lebih berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Suevey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 52 (lima puluh dua) Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemprov Kalbar melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), atau sebanyak 48,60 % Unit Pelayanan Publik melaksanakan SKM. Nilai rata-rata SKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah 82,49 atau kategori Baik. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya (Tahun 2016) yaitu 76,49 atau meningkat 6 poin. Nilai SKM tertinggi untuk Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 diraih oleh UPT Museum dengan nilai 94,94 atau kategori Sangat Baik.
2. Adapun dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, sebanyak 12 (dua belas) Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan SKM Tahun 2017 kepada Gubernur Kalbar. Nilai rata-rata SKM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah 80,33 atau kategori Baik. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya (Tahun 2016) yaitu 77,58 atau meningkat 2,75 poin. Nilai SKM tertinggi untuk Kabupaten/Kota diraih oleh Kabupaten Sintang dengan nilai 86,26 dan Kota Pontianak dengan nilai 82,81 atau kategori Baik.

   Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Provinsi Kalbar tahun 2017 adalah 81,41 dengan mutu pelayanan B (Baik). Hal ini merupakan nilai dari IKM Pemprov yaitu 82,49 dengan mutu pelayanan B (Baik) dan nilai IKM Kabupaten/Kota yaitu 80,33 dengan mutu pelayanan B (Baik).

6.6. Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar.

Maksud dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelayanan publik adalah sebagai salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar serta untuk meningkatkan kinerja melalui inventarisasi data mengenai pelaksanaan kebijakan pelayanan publik, yang nantinya akan menjadi bahan pengambilan kebijakan menuju terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov. Kalbar dan Pemerintah Kab./Kota se-Kalbar.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi pelayanan publik ini untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemprov. Kalbar dan Pemerintah Kab./Kota serta memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada unit kerja dilingkungan Pemprov. Kalbar dan Pemerintah Kab./ Kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota antara lain Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Sambas, Bengkayang, Landak.

6.7.Inovasi Pelayanan Publik.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Inovasi Pelayanan Publik adalah :

1. Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik.
2. Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik.
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

1. Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalbar pada tahun 2018 yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2018 adalah sejumlah 35 inovasi dengan rincian 11 inovasi berasal dari Pemprov dan 24 inovasi berasal Kab./Kota. Salah satu inovasi tersebut yang berasal dari dari Kab. Sanggau, yaitu inivasi Posduren (Posyandu Remaja entikong) berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Indonesia Tahun 2018, menyusul prestasi Pemprov dan Kota Pontianak yang pada tahun 2017 berhasil meraih Top 40.

2. Inovasi Posduren (Posyandu Remaja entikong) dari Puskesmas Entikong Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Indonesia Tahun 2018, menyusul prestasi Pemprov dan Kota Pontianak yang pada tahun 2017 berhasil meraih Top 40.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur.

Program ini terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu :

7.1.Fasilitasi dan Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Provinsi Kalbar.

Maksud dilaksanakan Penyusunan Formasi PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan dalam perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan, sehingga mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Tujuan dilaksanakannya Penyusunan Formasi PNS pada Pemprov. Kalbar adalah agar Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi di lingkungan Pemprov. Kalbar.

Penyusunan Formasi PNS Tahun 2018 dilaksanakan selama satu tahun anggaran tahapan kegiatan sebagai berikut :

1) Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Formasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018;
2) Menyusun data profil Daerah Kalimantan Barat Tahun 2018;
3) Menyusun rekapitulasi data Kelembagaan dan Data Bezetting Kepegawaian
4) Menyusun Data Guru dan Data Kesehatan.
5) Menyiapkan Surat Gubernur Kalimantan Barat tentang usulan Formasi PNS Tahun 2018.
6) Melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota di Prov. Kalbar. Untuk Tahun 2018, hanya bisa dlaksanakan pada 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Rekapitulasi terhadap Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan penyusunan Formasi PNS berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 890/0135/OR-C tanggal 4 Januari 2018 hal Penyusunan Formasi PNS Tahun 2018 adalah **Kabupaten Bengkayang** dan **Kabupaten Kubu Raya.**

Selain melakukan penyusunan formasi PNS di lingkungan Pemprov. Kalbar, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi e-formasi walaupun, pada Tahun ini tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena tidak didukung oleh anggaran sehingga tidak dapat dilakukan pemutakhiran database pada aplikasi e-formasi sehingga untuk data terkait jumlah sekolah SMA dan SMK serta kebutuhan guru belum terkini/*up to date*.

7.2.Asistensi Formasi PNS.

Maksud dilaksanakannya kegiatan Asistensi Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemprov. Kalbar yaitu untuk memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat pengawas/Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang membidangi kepegawaian/aparatur di masing-masing OPD sehingga dapat menyusun formasi PNS berdasarkan formulir penyusunan Formasi PNS mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Tujuannya adalah :

a. Menambah pengetahuan dan keterampilan peserta tentang penyusunan formasi PNS;
b. Mendorong OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan pemutakhiran data pada aplikasi E-Formasi.

Peserta Kegiatan Asistensi Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemprov. Kalbar Tahun 2018 terdiri dari Para Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang membidangi kepegawaian/aparatur di lingkungan Pemrpov. Kalbar.

7.3.Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional.

Maksud dilaksanakan kegiatan penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Tahun 2018 adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan, jabatan fungsional yang telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan.

Tujuan diadakannya penyusunan formasi jabatan fungsional sebagai salah satu persyaratan pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Pemprov. Kalbar baik melalui mekanisme, pengangkatan pertama, alih jabatan maupun *inpassing*.

Penyusunan Formasi Jabatan fungsional tahun 2018 yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Prov. Kalbar Tahun 2018.
b. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait nomenklatur jabatan fungsional yang terbaru yang telah ditetapkan oleh Kemenpan dan RB sehingga Tahun 2017 terdapat 145 nomenklatur jabatan fungsional sedangkan Tahun 2018 sebanyak 175 jabatan fungsional yang telah ditetapkan..
c. Menginformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah/unit kerja mengenai jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB dan meminta agar Kepala Perangkat Daerah/unit kerja menyampaikan usulan pengisian jabatan fungsional.
d. Menyampaikan formasi beberapa jabatan fungsional ke instansi pembina sesuai dengan surat yang disampaikan instansi pembina kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat seperti :
   1) Penyampaian formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dengan Surat pengantar Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 890/0261/OR-C tanggal 19 Januari 2018 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan yang telah dihitung berdasarkan Analisis Beban Kerja untuk pelaksanaan penyesuaian/*Inpassing* jabatan fungsional Pustakawan.

2) Penyampaian formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assesor SDM Aparatur melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 890/0638/OR-C tanggal 23 Februari 2018 hal Usulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assesor SDM Aparatur yang merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 158-9/99 tanggal 27 Desember 2018 tentang Petunjuk *Inpassing* jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assesor SDM Aparatur.

Pelaksanaan Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 dilaksanakan untuk Formasi Jabatan fungsional yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sampai tahun 2019 sejumlah 175 jenis jabatan fungsional. Namun karena pemotongan anggaran maka keputusan gubernur tidak dapat disusun kembali sehingga akan disusun kembali Tahun 2019.

7.4. Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja dilingkungan Prov. Kalbar.

Maksud dilaksanakan Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk memfasilitasi dan mendorong penyusunan dokumen ABK serta memverifikasi sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Tujuan dilaksanakannya Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah agar Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai dokumen ABK yang menunjukkan jumlah yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Namun demikian honorarium untuk tim hanya disediakan 9 (sembilan) bulan dari Bulan April sampai dengan Bulan Desember dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Tahapan Persiapan

   Pembentukan Tim Penyusunan Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Tahapan Pengumpulan Data
   Pengumpulan Data dalam kegiatan ini dengan mengirimkan surat kepada Perangkat Daerah dan UPT dengan menyusun dokumen ABK berpedoman dengan peraturan yang berlaku
c. Tahapan Verifikasi Data
   Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Biro Organisasi yaitu:
   1) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
   2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
   3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
   4) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
   5) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
   6) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
d. Tahapan Penetapan Dokumen ABK (Keputusan Gubernur Kalimantan Barat)
   1) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
   2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

7.5.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda.

Maksud dan Tujuan penyelenggaraan senam kesegaran jasmani adalah untuk mewujudkan dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani PNS sehingga pada gilirannya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Di samping itu juga akan terbangun Solidaritas Sosial di kalangan PNS yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan efektifitas kinerja secara optimal.

Sasaran kegiatan adalah seluruh PNS dilingkungn Sekretariat Daerah Prov Kalbar yang mencakup 9 (sembilan) Biro. Kegiatan yang dilakukan berupa Senam Kesegaran jasmani (SKJ) yang diikuti seluruh PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar yang dilaksanakan setiap hari Jum'at mulai pukul 07.00 s.d 08.00 wiba bertempat di Halaman Komplek kantor Gubernur Kalbar.

Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan Pembinaan Jasmani PNS di lingkungan Setda Provinsi Kalbar pada program pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur :

1. Memberikan motivasi, kreativitas kepada PNS di lingkungan Setda Provinsi Kalbar dalam berolahraga khususnya senama kesegaran jasmani dan olahraga lainnya
2. Menjaga kebugaran dan kesehatan dengan berolahraga
3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

7.6.Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda.

Maksud dan tujuan terkait dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Kalbar agar terciptanya pengelolaan dan penataan administrasi yang baik serta pegawai dapat melakukan pekerjaan lebih efisien, Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara propesional dengan didasari kepribadian, etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi/organisasi serta terciptanya tertib administrasi dalam penyusunan dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar.

Sasaran kegiatan adalah seluruh PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalbar yang mencakup 9 (sembilan) Biro.

Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PNS di lingkungan Setda Provinsi Kalbar selama tahun 2018 adalah :

1. Kenaikan Gaji berkala berjumlah : 174 orang
2. Kenaikan Pangkat berjumlah 66 orang, terdiri dari :
   - Periode April 2018 berjumlah 39 orang
   - Periode Oktober 2018 berjumlah 27 orang
3. Cuti PNS berjumlah 120 orang terdiri dari :
   - Cuti besar 6 orang
   - Cuti alasan penting 7 orang
   - Cuti tahunan 98 orang
   - Cuti sakit 5 orang
   - Cuti bersalin 2 orang
4. Ijin Belajar PNS, teridir dari :
   - S1 sebanyak 1 orang
   - S2 sebanyak 1 orang
5. Mutasi masuk berjumlah 15 orang
6. Mutasi keluar instansi berjumlah 12 orang
7. Mutasi antar Biro 7 orang
8. Usulan pensiun berjumlah : 21 orang, terdiri dari :
   - Batas usia Pensiun : 19 orang
   - Pensiun Dini : 1 orang
   - Pensiun meninggal : 1 orang

7.7.Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar.

Maksud dan tujuan adalah dalam rangka lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2018, antara lain :

a. Menghimpun dan menata buku bahan koleksi Perpustakaan

b. Melakukan penyimpanan pelestarian bahan pustaka terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dari jaman penjajahan Belanda tahun 1916, Surat Kabar Akcaya dari tahun 1977-1999, Surat Kabar Pontianak Post dari tahun 2000 -2018.
c. Mengolah data Buku Perpustakaan sesuai dengan Klarifikasinya berjumlah 732.090 buku.
d. Menjilid bahan pustaka yang rusak sebayak 35 buku
e. Menjilid Majalah /Koran :
   - Trubus bulan Januari sampai dengan Desember 2018 = 1 buku
   - Tempo bulan Januari sampai dengan Desember 2018 = 1 buku
   - Gatra bulan Januari sampai dengan Desember 2018 = 1 buku
   - Koran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 = 4 buku
f. Melayani pengunjung Perpustakaan dai bulan Januari sampai dengan Desember sebanyak 350 orang terdiri dari :
   - Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar
   - Pegawai dari Luar Instansi
   - Mahasiswa
   - Pelajar
   - Masyarakat

7.8.Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dilingkungan Prov. Kalbar

Tujuan dari pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

a. Untuk membantu dan memudahkan unit kerja dalam melaksanakan analisis jabatan sesuai dengan format-format data serta langkah-langkah yang akan dilakukan termasuk dalam perumusan hasil analisis jabatan.
b. Sebagai bahan masukan bagi unit kerja dalam melakukan penataan kepegawaian serta bagi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana.
c. Untuk memberikan kejelasan tentang tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang masing-masing pemegang jabatan baik struktural maupun non struktural guna peningkatan profesionalisme dan kinerja

Berdasarkan Permenpandan RB Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan, makalangkah-langkah yang harus dilakukan dalam Penyusunan Analisis Jabatan, sebagai berikut :

a. Pengumpulan data, yaitu dengan cara mengumpulkan data atau inventarisir tugas yang dilaksanakan dengan keadaan apa adanya tanpa direkayasa (potret).Hal yang diperhatikan dalam melakukan inventarisasi tugas, yaitu :
   1) Tetapkan eselon terbawah (Eselon IV)
   2) Tugas yang dilaksanakan sesuai tupoksi

3) Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas (volume kerja)
4) Waktu minimal dan maksimal pelaksanaan tugas.

b. Pengolahan data, yaitu :
   1) Penyusunan Uraian Jabatan
   2) Penyusunan Spesifikasi Jabatan
   3) Penyusunan Spesifikasi menurut macam informasi
   4) Penyusunan Kode Jabatan
c. Verifikasi Jabatan
d. Seminar Hasil Analisis Jabatan
e. Penyempurnaan
f. Penetapan hasil analisis jabatan dengan Keputusan Gubernur dengan lampiran : Daftar Susunan Pemegang Jabatan dan Peta Jabatan.

Peran Tim Pelaksana Asistensi dan verifikasi Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Bara dimulai dari Verifikasi Jabatan hingga penetapan hasil draft Analisis Jabatan yang disusun oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sempurna.

7.9.Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan se-Kalbar

Maksud dari kegiatan ini adalah menciptakan suatu pelaksanaan Analisis Jabatan yang berkualitas untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pengawasan. Sedangkan tujuannya adalah :

a. Menemukan hambatan dalam penyusunan analisis jabatan di Kabupaten/Kota;
b. Memberi kesempatan kepada pejabat di Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyumbangkan pemikiran dan saran-saran terhadap efektivitas pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan;
c. Memberikan masukan dan umpan balik untuk perencanaan kegiatan penyusunan Analisis Jabatan selanjutnya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan analisis jabatan pada tahun anggaran 2018 dilaksanakan pada beberapa kabupaten/kota. Kondisi ideal monitoring dan evaluasi dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota yang menyusun analisis jabatan. Adapun Kabupaten/Kota yang tidak dilakukan monitoring dan evaluasi adalah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kayong Utara.

Monitoring dan evaluasi penyusunan analisis jabatan memfokuskan pada jumlah analisis jabatan yang sudah disusun oleh perangkat daerah dengan menyebarkan kuesioner maupun wawancara kepada pejabat di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten/Kota. Unsur-unsur yang dimonitoring dan dievaluasi antara lain :

a. Jumlah OPD yang ada di Kab/Kota
b. Jumlah OPD yang telah menyusun dan menyampaikan Dokumen Analisis Jabatan ke bagian organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru
c. Waktu yang diperlukan OPD dalam menyusun Dokumen Analisis Jabatan :
   - < 1 bulan
   - 1 – 3 bulan
   - 3 bulan
d. Waktu yang diperlukan OPD dalam menyempurnakan Dokumen Analisis Jabatan :
   - < 1 bulan
   - 1 bulan
   - > 1 bulan
e. Jumlah Dokumen Analisis Jabatan yang telah diverifikasi oleh bagian Organisasi
f. Hasil Verifikasi Dokumen Analisis Jabatan :
   - Banyak Terdapat Koreksi/Tidak Sesuai dengan pedoman penyusunan
   - Sedikit Koreksi
   - Tidak ada koreksi
g. Waktu yang diperlukan untuk memverifikasi 1 dokumen Analisis Jabatan :
   - < 1 minggu
   - 1 – 4 minggu
   - > 4 minggu
h. Jumlah OPD yang Dokumen Analisis Jabatan telah ditetapkan melalui keputusan Bupati/Walikota
i. Kendala yang dihadapi OPD dalam menyusun Dokumen Analisis Jabatan
j. Kendala yang dihadapi dalam memverifikasi dokumen Analisis Jabatan
k. Solusi yang diberikan oleh bagian organisasi dalam menghadapi kendala penyusunan OPD.

7.10.Workshop Analisis Jabatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan tenaga – tenaga yang handal dalam menyusun analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan guna terwujudnya percepatan penataan manajemen ASN yang di dukung oleh ASN yang profesional.

Tujuan dari kegiatan ini antara lain :

1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pejabat / analis kepegawaian / analis jabatan / pelaksana yang bertugas menyusun dokumen analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan di masing-

masing unit kerja agar sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.

2) Pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur secara berkelanjutan serta membangun jejaring kerja yang mampu mendukung dan meningkatkan kinerja serta penyegaran pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam penyusuanan analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan.

Pelaksanaan Kegiatan Workshop Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu dari tanggal 19 s.d. 20 Juli 2018 dari pukul 08.00 WIB s.d. selesai bertempat di Hotel Kini Komplek Nusa Indah, Jalan Nusa Indah III, Pontianak.

Jadwal pelaksanaan Workshop Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didahului dengan laporan ketua panitia pelaksana dan diikuti dengan pidato Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum sekaligus membuka secara resmi Workshop Analisis Jabatan.

Peserta Workshop Analisis Jabatanini berasal dari OPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat berjumlah 109 orang dengan rincian sebagai berikut :

Provinsi : 72 Orang
Kabupaten/Kota : 37 Orang

Pada Workshop Analisis Jabatan ini disampaikan materi antara lain :

a. Materi penataan sumberdaya manusia aparatur yang meliputi Implementasi Manajemen ASN di Provinsi Kalimantan Barat disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang di wakili oleh Asisten Administrasi dan Umum, Ibu Dra. Marlyna, M.Si.
b. Penyusunan Analisis Jabatan yang meliputi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan disampaikan oleh Kabid Pengembangan Kompetensi ASN Kemenpan RB, Bapak Drs. Supardiyana.
c. Implementasi penyusunan Analisis Jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Dra. Yunda Rochaningsih.
d. Materi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan disampakian oleh Kabid Pengembangan Kompetensi ASN KemenpanRB, Bapak Drs. Supardiyana.

8. Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan.

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu :

8.1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar Tahun

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Penyusunan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Pemprov Kalbar adalah untuk menindaklanjuti Diktum Ketiga Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Perjanjian kinerja dimaksud merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan Penyusunan Perjanjian kinerja itu sendiri yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai**.**

Hasil pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan perubahan Indikator Kinerja Daerah sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 menggunakan Indikator Kinerja Daerah yang setelah perubahan.
- Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 memiliki 18 (delapan belas) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 diserahkan ke Kementerian pada satu bulan setelah DPA di tetapkan.
- Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 telah disampaikan ke Kementerian PAN & RB pada tanggal 29 Maret 2018.

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 disusun berdasarkan dokumen RPJMD Prov. Kalbar Periode 2013-2018, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 642/Or/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 396/Or/2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Apabila terdapat perubahan APBD Tahun 2018 maka Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan dilakukan perubahan sesuai dengan APBD yang terbaru.
- Terdapat kendala saat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu terdapat beberapa anggaran UPT yang masih belum ditetapkan di dalam ADBP Prov. Kalbar sehingga menghambat penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar karena di dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut juga menyajikan anggaran seluruh UPT di lingkungan Pemprov. Kalbar.
- Indikator hasil dari kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar ini yaitu Porsentase SKPD Pemprov yang menyusun Perjankin dengan Baik dengan target 75% dan capaian indikator tersebut sebesar 80 % yaitu sebesar 29 Perangkat Daerah.
- Indikator output dari kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar ini yaitu Dokumen Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2018 dengan target kinerja 1 dokumen dan capaian indikator tersebut sebesar 1 dokumen Laporan Kegiatan.

8.2. Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD Pemprov. Kalbar.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum Tahun 2018 di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar.
2. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja
3. Memfasilitasi penyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

1. Pelaksanaan Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemprov Kalbar dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2018. Peserta asistensi meliputi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 disampaikan paling lambat tanggal 2 Februari 2018 dan seluruh Perangkat daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2017 kepada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar.
3. Substansi Reviu atas hasil asistensi LKj dan Perjankin Perangkat Daerah terdiri dari:
   - Format (Daftar Isi) dan kelengkapan LKj dan Perjankin Perangkat Daerah;
   - Kualitas dan Kedalaman Berakuntabilitas dalam Isi dan Substansi LKj.
   - Penyajian Data Umum Kinerja Makro
   - Termasuk Ketepatan Waktu Penyampaian LKj
4. Pelaksanaan Reviu atas hasil asistensi LKj dan Perjankin Perangkat Daerah Tahun 2018 :
   - Reviu dilakukan terhadap LKj dan Perjankin Perangkat Daerah.
   - Reviu dilakukan dengan menggunakan teknik “criteria referrenced survey” yaitu survey berdasarkan kriteria dengan menggunakan yes/no question terhadap kriteria.
   - Kriteria tersebut merupakan ketentuan-ketentuan dan *best practice* yang harus disajikan dalam LKj
5. Output dari kegiatan ini yaitu berupa Laporan Hasil Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja sebanyak 2 dokumen.
6. Indikator hasil dari kegiatan asistensi ini yaitu Persentase Perangkat Daerah Pemprov. Kalbar yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dengan baik dengan target 75% dan capaian indikator tersebut sebesar 75% yaitu baru 28 Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

8.3. Penyusunan Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini adalah melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan dan sejauhmana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Daerah dan segenap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara terus-menerus telah berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja terutama terkait dengan penyempurnaan dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja sesuai rekomendasi yang disampaikan Kementerian PAN dan RB atas evaluasi laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 yang lalu.

Selanjutnya, pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat **telah men-*design* satu sistem aplikasi untuk pengumpulan data kinerja yang terintegrasi dengan seluruh SKPD Pemprov Kalbar** yang telah di*launching* pada bulan April 2015. Aplikasi dimaksud juga merupakan upaya monitoring pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala dengan menggunakan sistem monitoring yang terintegrasi yang **turut direkomendasikan oleh Menpan dan RB**.

Laporan Kinerja yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Terhadap rekomendasi yang disampaikan Menpan dan RB atas evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2017, telah dilakukan beberapa perbaikan antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini sedang melakukan revisi terhadap dokumen RPJMD agar setiap sasaran strategis terdapat indikator kinerja utama yang berkualitas *outcome;*
2. Telah menselaraskan IKU yang berlaku di Lingkungan Pemprov dengan IKU tingkat OPD;
3. Telah mengupayakan peningkatan kualitas penyajian informasi kinerja pada OPD Pemprov, antara lain menjelaskan capaian IKU.

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah dipaparkan pada Laporan Kinerja Pemprov dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2017 yang mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD dan perjanjian kinerja Tahun 2017 sebagian besar dapat terpenuhi dan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi-nya terutama dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

- Indikator hasil dari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini yaitu Porsentase SKPD Pemprov yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjankin dengan Baik dengan target 75% dan capaian indikator tersebut sebesar 75% karna baru 28 Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja sesuai Peraturan yang berlaku.
- Indikator output dari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini yaitu Dokumen Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2017 dengan target 1 dokumen dan capaian indikator tersebut 1 dokumen atau sebesar 100%.

8.4. Workshop Penyusunan Cascading Kinerja OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya **Workshop Penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah** yaitu :

1. Sebagai salah satu kegiatan penunjang untuk meningkatan Predikat Nilai SAKIP Pemprov Kalbar dari nilai “B” menjadi “BB”.
2. Sebagai pedoman sasaran dan indikator kinerja di dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

a. Rencana awal kegiatan **Workshop Penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah** dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 27 September 2018 bertempat di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi sehubungan dengan kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kemenpan dan RB di Hotel Mercure Pontianak pada tanggal 24 s/d 25 September 2018, sehingga kegiatan Workshop ini dialihkan ke Hotel Mercure Pontianak, dikarenakan Narasumber merupakan tim Evaluator Kementerian PAN dan RB dan peserta kegiatan Workshop ini juga merupakan peserta Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN dan RB.
b. Peserta Kegiatan Workshop Penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah ini terdiri dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro Setda Prov. Kalbar, Sekretaris Dinas/Badan dan Kepala Sub Bagian Renja/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c. Para peserta yang hadir diminta untuk membawa Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah beserta Laptop.
d. Output Kegiatan *Workshop* Penyusunan *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah yaitu : Dokumen *Cascading* (Penjabaran Kinerja) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedangkan indikator

*outcome*nya yaitu persentase Perangkat Daerah yang menggunakan *Cascading* Kinerja sebagai pedoman dokumen perencanaan.

e. Setiap sasaran pembangunan (*impact*), indikator kinerja dan target dalam dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Daerah (RPJMD atau RKPD), dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan di tingkat OPD (Renstra atau Renja OPD) berupa sasaran stategis (*outcome-impact),* indikator kinerja dan target.
f. Setiap sasaran strategis (*outcome-impact*), indikator kinerja dan target OPD, dijabarkan ke dalam sasaran program (yang tergambar dalam *outcome),* indikator kinerja program dan target yang ada di masing-masing unit organisasi eselon 2 di bawahnya.
g. Setiap sasaran program (*outcome*) unit organisasi eselon 2, dijabarkan (*cascading)* ke dalam sasaran kegiatan (*output),* indikator kinerja program dan target yang ada di masing-masing unit organisasi eselon 3/unit kerja mandiri di bawahnya.
h. Setiap sasaran kegiatan (*output*) digunakan dasar untuk merencanakan berbagai proses yang akan dilakukan dan besarnya sumberdaya yang diperlukan (dana dan lainnya) dalam upaya untuk menghasilkan *output*.
i. Penjabaran (*cascading)* harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality)*, serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*).

- Indikator hasil dari kegiatan Workshop Cascading ini yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Cascading Kinerja sebagai pedoman dokumen perencanaan dengan target 95% dan capaian indikator tersebut sebesar 70 % atau sebanyak 26 Perangkat Daerah.
- Indikator output dari kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Cascading kinerja Pemprov Kalbar yang disusun dengan baik dan benar dengan target 45 Perangkat Daerah sedangkan capaian indikator tersebut sebesar 30 Perangkat Daerah.

Berikut ini ditampilkan perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama selama Tahun 2016-2018:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
06.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**								
	Penyediaan Jasa Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	4 Unit							
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah ketersediaan materai dan buku cek untuk jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	750 Lembar	2600 materai	1600 materai	1600 materai	100	1900 Materai		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	1 Paket							
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum	1 Paket	500 porsi/2jenis	1 tahun	1 tahun	100	390 Porsi/2 jenis		
	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	80%	1 tahun	85 %	85 %	100	80 %		
	Penataan dan Pemeliharan Arsip	Jumlah pemeliharaan dan penataan arsip	80%	1 tahun	80 %	80 %	100	80 %		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	**Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran**								
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 1 tahun	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin	Jumlah AC/Kipas Angin yang terpelihara selama 1 tahun	11 Unit	-	-	-	-	16 Unit		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara selama 1 tahun	62 Unit	-	-	-	-	PC 14 Unit, Laptop 12 Unit, printer 31 Unit		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									
	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS Setda yang menguti Diklat	30 0rang		50 org	50 org	100	1 tahun		
	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Sosilisasi, Bimtek dan Workshop	100%		35 org	35 org	100	1 tahun		
	Penyusunan Penetapan Kinerja	Dokumen penetapan kinerja biro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 dokumen		
	Penyusunan Anjab	Dokumen Anjab Biro Organisasi			1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		
	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jangka waktu pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani Aparatur	1 Tahun		45 org	45 org	100	1 Kali (45 PNS)		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	**Prosentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan**								
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan dan tahunan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen/3 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2019 yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen Renja Biro Tahun 2021 yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		
	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ tahun 2019 yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen		
	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Tahun 2021 yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen		
	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan terhadap permintaan data/informasi pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 Dokumen							
	Penyusunan RENSTRA	Tersusunnya RENSTRA Biro Organisasi			1 Dokumen			1 Dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	**Prosentase peningkatan pelaproan dan inventarisasi aset Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar**								
	Penyusunan /Pelaporan Inventarisasi Aset	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset Biro yang tersusun	1 Dokumen							
	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	**Prosentase peningkatan penataan kelembagaan pemerintah daerah yang tepat struktur dan fungsi**								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah PERDA perangkat daerah yang diubah	1 Perda					1 Perda	1 Perda	100
	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov Kalbar	Jumlah Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar yang akan disusun	3 Pergub					3 Rancangan Pergub	15 Pergub	100
	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas	Tersedianya Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Cabang Dinas.	1 Pergub							
	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah UPT yang akan dilakukan penataan	5 UPT							
	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar	Jumlah Peserta yang akan mengikuti Rakortek bidang organisasi se Kalbar	80 Peserta					80 Peserta	80 Peserta	100
	Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan PD Kab/Kota	14 Kabupaten/Kota					14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota	100
	Koordinasi Tingkat Nasional dibidang Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Tingkat Nasional di Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Laporan							
	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kab/Kota	Jumlah Data perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang terintegrasi	Data Kelembagaan PD							
	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	0								
	Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah data susunan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota		14 Kabupaten/ Kota	14 Kabupaten/ Kota	14 Kabupaten/ Kota	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	**Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur**								
	Asisten Penyusunan SOP pada PD/UPTdilingkungan Pemprov.	Persentase Perangkat Daerah/UPT yang menyusun SOP	100%					70%	100%	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan standarisasi, sistem dan prosedur pada Kab/Kota	5 Laporan							
	Penyusunan Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	Jumlah Kebijakan tentang TND	1 kebijakan							
	Penyusunan Kebijakan tentang Pakaian Dinas	Jumlah Kebijakan tentang Pakaian Dinas	1 Pergub							
	Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan	Prosentase kehadiran pada rakor tingkat nasional bidang Ketatalaksanaan	100%							
	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Laporan					1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Laporan		20 UPP	50 UPP	100	10 UPP Pemprov.dan Kab/Kota	50 UPP Pemprov.dan Kab/Kota	100
	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi pelayanan publik Pemprov. Kalbar	12 inovasi					11 Inovasi	11 Inovasi	100
	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PD/UPT dan Biro yang dimonitoring dan dievaluasi	45 PD/UPT/Biro	1 laporan	10 Kab/kota	6 Kab/kota	60	14 Kab/kota	5 Kab/kota	35

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov.Kalbar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	**Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur**								
	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah dokumen penyusunan Anjab dilingkungan Prov. Kalbar yang dilakukan verifikasi	12 Dokumen ANJAB	15 SKPD						
	Penyusunan Standar Kompetensi JPT, Administrasi dan Fungsional dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi JPT, Administrasi dan Fungsional	12 Dokumen							
	Penyusunan formas ASN	Jumlah Dokumen Formasi ASN	2 Dokumen							
	Penyusunan ABK di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Dokumen ABK yang diverifikasi	9 Dokumen					5 Dokumen	6 Dokumen	100
	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024	Jumlah Dokumen Road Map RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen							
	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Monev Reformasi Birokrasi Kab/Kota	4 Kab/Kota							
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Kepegawaain yang diproses	9 Dokumen	450 Pegawai	450 Pegawai	480 Pegawai	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Jabatan ASN Setda	12 Orang							
	Pengelolaan Perpustakaan Setda. Prov. Kalbar	Meningkatnya jumlah minat baca di perpustakaan Setda	100 Org	750 Org	750 org	124 org	16,53	350 org	350 org	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	**Prosentase Peningkatan pengembangan pengawasan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah**								
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	100
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah dokumen perjanjian kinerja Pemprov. Kalbar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Laporan	1 Laporan	100
	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah PD yang mengikuti asistensi penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	37 Perangkat Daerah					75%	75%	100
	Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah	Jumlah Kab/Kota yang telah dibina	5 Kab/Kota							
	Workshop SAKIP	Jumlah peserta yang mengikuti Workshop SAKIP	45 Perangkat Daerah							

B. ANALISIS PELAYANAN KINERJA BIRO ORGANISASI

Analisis kinerja pelayanan Biro Oganisasi berdasarkan hasil kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut :

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM/ Stándar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		PROYEKSI		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran			60%	70%	80%	46%	70%	80%	46%	51%	
	1. Jumlah Perangkat Daerah yang ditata			-	8 OPD	1 Raperda	17PD	42 OPD	1 Raperda	17PD	19 PD	
2.	IKM Provinsi Kalbar						83			83	85	
	1. IKM Pemerintah Provinsi Kalbar			-			85%		82,49%	85%	87%	
	2. Jumlah kebijakan penerapan standar, sistem dan prosedur			-		1 Keb	3 Keb		2 Keb	3 Keb	4 Keb	
3.	Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur						20%		20%	20%	40%	
	1. Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur						20%		20%	20%	40%	
	2. Prosentase PNS Setda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur						16%		10%	16%	32%	
	3. Prosentase peningkatan pengelolaan bahan pustaka						100%		100%	100%	100%	
4.	Nilai pelaporan kinerja						10,5		10,28	10,5	11	
	1. Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu						100%		100%	100%	100%	

C. ISU-ISU PENTING PEYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BIRO ORGANISASI.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan SKPD terkait dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi sebagai berikut :

a. Masih adanya revisi berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang organisasi.
b. Belum adanya Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian dinas lapangan di Perangkat Daerah yang melayani langsung ke masyarakat.
c. Belum semua Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
d. Belum adanya sinkronisasi di bidang ketatalaksanan dalam pengimplementasian Peraturan, antara Kementerian PAN & RB serta Kementerian Dalam Negeri.
e. Masih rendahnya pemahaman aparatur dalam penyusunan SOP.
f. Masih terdapat penyajian análisis program/kegiatan dalam pencapaian keberhasilan atau kegagalan yang belum dijabarkan secara komprehensip.
g. Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian Laporan Kinerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Kalbar.

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendala tersebut, antara lain :

a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar membuat segera membuat Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dimaksud.
c. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SKM di daerah sehingga mengikat semua unit pelayanan dalam melaksanakan SKM.
d. Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/kota melalui kegiatan sosialisasi dibidang ketatalaksanaan.
e. Perlu diadakan sosialisasi atau in house training oleh masing–masing Perangkat Daerah.
f. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah untuk membuat análisis pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja.
g. Memberikan peringatan kepada Perangkat Daerah yang menyampaian Laporan Kinerja (LKj) melampaui batas waktu yang ditentukan.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi di dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Penataan organisasi perangkat daerah yang efesien, efektif dan proporsional berdasarkan kewenangan karakteristik dan potensi daerah.
2. Perubahan dan perkembangan kebijakan aparatur.

3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Perlunya peningkatan kemampuan Pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok.

D. REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 tidak mengalami banyak perubahan kegiatan dan program dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan dan program tersebut diselenggarakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Perencanaan program dan kegiatan tahun 2019 dibuat sesuai dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah ProvinsI Kalimantan Barat.

Secara keseluruhan, hasil telahaan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada pada table 2.3.

TABEL. 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**591.517.000**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**342.148.700**	
	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ditanggung jasa pembayaran pajaknya selama 1 tahun	2 mobil, 2 motor	4.800.000	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ditanggung jasa pembayaran pajaknya selama 1 tahun	4 unit	3.500.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pontianak	Jumlah ketersediaan materai dan buku cek untuk jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	1.875 buah materai, 2 buku cek	8.700.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pontianak	Jumlah ketersediaan materai dan buku cek untuk jasa administrasi keuangan selama 1 tahun	1 tahun	3.750.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pontianak	Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman peserta rapat dan pelayanan tamu Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 tahun	24.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pontianak	Jangka waktu penyediaan makanan dan minuman peserta rapat dan pelayanan tamu Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 tahun	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Penggandaan selama 1 tahun	50.000 lbr	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pontianak	Jumlah Penggandaan selama 1 tahun	20.800 lbr	6.240.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	Pontianak	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	1 dokumen	440.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	Pontianak	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun	1 dokumen	218.964.000	
	Penataan dan Pemeliharaan Kearsipan	Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan penataan dan pemeliharaan arsip	12 bulan	104.017.000	Penataan dan Pemeliharaan Kearsipan	Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan penataan dan pemeliharaan arsip	12 bulan	79.694.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Terpeliharanya aset Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar**	**100%**	**93.200.000**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**Terpeliharanya aset Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar**	**100%**	**68.258.000**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ operasional	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 1 tahun	2 mobil, 2 motor	39.200.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/ operasional	Pontianak	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara selama 1 tahun	4 unit	33.858.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas	Pontianak	Jumlah AC yang terpelihara selama 1 tahun	11 unit	24.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas	Pontianak	Jumlah AC yang terpelihara selama 1 tahun	11 unit	10.800.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	Pontianak	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara selama 1 tahun	46 PC/Laptop , 44 Printer	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	Pontianak	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara selama 1 tahun	62 Unit	23.600.000	
III	**Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**		**Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	100%	**461.843.100**	**Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**		**Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	100%	**217.664.800**	
	Pendidikan dan Latihan	Dalam/ luar daerah	Jangka waktu pelaksanaan Diklat		150.000.000	Pendidikan dan Latihan	Dalam/ luar daerah	Jangka waktu pelaksanaan Diklat	25 org	103.765.500	
	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan sosialisasi, bimtek dan workshop	1 tahun	109.843.100	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan sosialisasi, bimtek dan workshop	30 org	96.649.500	
	Pembinaan Jasamani dan Rohani	Pontianak	Jangka waktu pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani Aparatur	1 tahun	125.000.000	Pembinaan Jasamani dan Rohani	Pontianak	-	-	0	
	Penyusunan Analisis Jabatan	Pontianak	Jumlah Dokumen ANJAB Biro yang tersusun	1 kali	32.000.000	Penyusunan Analisis Jabatan	Pontianak	-	-	0	
	Penyusunan SOP	Pontianak	Jumlah SOP Biro yang tersusun	1 dokumen	33.000.000	Penyusunan SOP	Pontianak	-	-	0	
	Penyusunan Penetapan Kinerja	Pontianak	Jumlah Perjanjian Kinerja Biro yang tersusun	1 dokumen	16.500.000	Penyusunan Penetapan Kinerja	Pontianak	Jumlah Perjanjian Kinerja Biro yang tersusun	1 dokumen	17.249.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	**Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Tersedianya dokumen laporan kinerja dan keuangan**	**100%**	**277.000.000**	**Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Tersedianya dokumen laporan kinerja dan keuangan**	**100%**	**219.743.300**	
	Penyusunan Laporan Keuangan	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semsteran dan Tahunan yang tersusun	1 dokumen	35.200.000	Penyusunan Laporan Keuangan	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semsteran dan Tahunan yang tersusun	1 dokumen	28.202.500	
	Penyusunan LAKIP	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2018 yang tersusun	1 dokumen	38.500.000	Penyusunan LAKIP	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2018 yang tersusun	1 dokumen	12.217.600	
	Penyusunan RENJA	Pontianak	Jumlah Dokumen RENJA Biro Tahun 2020 yang tersusun	1 dokumen	35.000.000	Penyusunan RENJA	Pontianak	Jumlah Dokumen RENJA Biro Tahun 2020 yang tersusun	1 dokumen	23.500.000	
	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Pontianak	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Tahun 2018 yang tersusun	2 dokumen	20.000.000	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Pontianak	Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Tahun 2018 yang tersusun	2 dokumen	19.421.800	
	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2020 dan DPA SKPD Tahun 2019 yang tersusun	2 dokumen	25.000.000	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pontianak	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2020 dan DPA SKPD Tahun 2019 yang tersusun	2 dokumen	21.837.700	
	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pontianak	Jangka waktu pengelolaan pelayanan Informasi dan dokumentasi	1 tahun	80.000.000	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pontianak	Jangka waktu pengelolaan pelayanan Informasi dan dokumentasi	1 tahun	114.563.700	
V	**Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah**	**Pontianak**	**Peningkatan Pelaporan Aset Biro**	**100%**	**12.500.000**	**Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah**	**Pontianak**	**Peningkatan Pelaporan Aset Biro**	**100%**	**12.321.700**	
	Penyusunan/pelaporan Inventarisasi Aset	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Ivetarisasi Aset Biro yang tersusun	1 dokumen	12.500.000	Penyusunan/pelaporan Inventarisasi Aset	Pontianak	Jumlah Dokumen Laporan Ivetarisasi Aset Biro yang tersusun	1 dokumen	12.321.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	**Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah**		**Peningkatan Kelembagaan Pemerintaha Daerah**		**884.000.000**	**Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah**		**Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah**		**538.504.600**	
	Fasilitasi Penataan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	Dalam/ Luar Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi penataan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah prov. Kalbar	1 laporan	100.000.000	Fasilitasi Penataan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	-	-	-		
	Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Luar daerah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi penataan kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen laporan	75.000.000	Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	-	-	-		
	Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Luar daerah	Jumlah provinsi yang didikunjungi Dalam Rangka pengembangan kapasitas Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	2 Provinsi	59.000.000	Pengembangan Kapasitas Dalam Rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	-	-	-		
	Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengendalian dalam rangka penataan perangkat daerah	14 kab/kt	150.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengendalian dalam rangka penataan perangkat daerah	14 kab/kt	68.609.400	
	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah hasil rumusan rekomendasi Rakor Teknis Bidang Organisasi	1 rekomendasi	100.000.000	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah hasil rumusan rekomendasi Rakor Teknis Bidang Organisasi	1 rekomendasi	78.600.000	
	Fasilitasi Kelembagaan UPT dilingkungan Prov. Kalbar	Pontianak	Prosentase UPT yang telah dilakukan fasilitasi mengalami perubahan tupoksi/pembentukan UPT	5%	150.000.000	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah yang akan dilakukan pentaan	5 UPT	66.962.300	
	Penyusunan Aplikasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Pontianak	Jumlah aplikasi kelembagaan perangkat daerah yang disusun	1 buah aplikasi	150.000.000	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Pontianak	Jumlah data perangkat daerah yang terintegrasi	Data kelembagaan PD	37.660.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Workshop Sinkronisasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Pontianak	Jumlah Perankat Daerah yang mengikuti workshop sinkronisasi penataan kelembagaan perangkat daerah provinsi dan kab/kota	33 Perangkat Daeah Prov dan 14 Kab/Kota	100.000.000	Workshop Sinkronisasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	--	-	-		
	-	-	-	-	-	Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah PERDA perangkat daerah yang diubah	1 Perda	147.914.000	
	-	-	-	-	-	Penyusunan Pergub tentang Tugas Pokok dan Fungsi PD Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Pergub Tupoksi PD Prov. Kalbar yang akan disusun	3 Pergub	35.603.200	
	-	-	-	-	-	Penyusunan Pergub tentang Pembentukan Cabang Dinas	Prov. Kalbar	Tersedianya Pergub ttg Pembentukan Cabang Dinas	1 Pergub	69.225.700	
	-	-	-	-	-	Koordinasi Tingkat Nasional dibidang Kelembagaan PD	Luar Prov. Kalbar	Jumlah Laporan Kordinasi Tk. Nasional di Bid. Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Laporan	33.930.000	
VII	**Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**		**Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah**		**668.850.000**	**Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**		**Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah**		**615.475.700**	
	Koordinasi Penataan Ketatalaksanaan	Dalam/Luar Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi penataan ketatalaksanaan	1 laporan	75.000.000	Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan	Dalam/ Luar Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi penataan ketatalaksanaan	1 laporan	40.570.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penawasan terkait penataan ketatalaksanaan	7 Kab/kota	79.350.000	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penawasan terkait penataan ketatalaksanaan	7 Kab/kota	50.947.500	
	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan	Pontianak	Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan yang disusun	1 pergub	40.000.000	Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan	-	-	-	-	
	Sosialisasi Bidang Ketatalaksanaan	Pontianak	Jumlah peserta sosialisasi bidang ketatalaksanaan	90 Org	70.000.000	Sosialisasi Bidang Ketatalaksanaan	-	-	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Evaluasi Penerapan SOP dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah dan UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang dilakukan evaluasi terhadap penerapan pelaksanaan SOP	15 OPD dan 10 UPT	65.000.000	Fasilitasi Evaluasi Penerapan SOP dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	-	-	-	-	
	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Pontianak	Jumlah Laporan SPM yang disusun	1 Laporan	84.000.000	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Pontianak	Jumlah Laporan SPM yang disusun	1 Laporan		
	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Pontianak	Jumlah Laporan SKM yang disusun	1 Laporan	61.000.000	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Pontianak	Jumlah Laporan SKM yang disusun	1 Laporan	47.338.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peyelenggaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar	5 kab/kota	61.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peyelenggaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar	5 kab/kota	61.530.000	
	Inovasi Pelayanan Publik	Pontianak	Jumlah inovasi pelayanan publik	12 Inovasi	84.000.000	Inovasi Pelayanan Publik	Pontianak	Jumlah inovasi pelayanan publik	12 Inovasi	68.720.000	
	Fasilitasi peningkatan kinerja penyeleggaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah atau UPT yang mendapat nilai kepatuhan tinggi (zona hijau) terhadap standar pelayanan publik di Prov.Kalbar	10 Perangkat Daerah/ UPT	69.500.000	Fasilitasi peningkatan kinerja penyeleggaraan pelayanan publik di Prov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah atau UPT yang mendapat nilai kepatuhan tinggi (zona hijau) terhadap standar pelayanan publik di Prov.Kalbar	10 Perangkat Daerah/ UPT		
	-	-	-	-	-	Penyusunan Pergub tentang Pakaian Dinas	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kebijakan tentang pakaian dinas	1 Pergub	34.487.500	
	-	-	-	-	-	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah PD/UPT yang mengikuti sosialisasi bidang TND	90 Peserta	54.438.000	
	-	-	-	-	-	Monev penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Pemprov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah PD/UPT dan Biro yang dimonitoring dan evaluasi	45 PD/Biro dan UPT	122.148.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	Asistensi Penyusunan SOP pada UPT dilingkungan Pemprov. Kalbar	Pontianak	Persentase PD/UPT yang menyusun SOP	70%	65.000.000	
VIII	**Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur**		**Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur**		**1.196.089.900**	**Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur**		**Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur**		**917.203.050**	
	Fasilitasi dan Verifikasi Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Pemerintah Prov dan Kab/Kota se-Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen penyusunan formasi PNS pada Perangat Daerah Prov. Kalbar dan Kab/Kota se-kalbar yang dilakukan verifikasi	15 dokumen	110.000.000	Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Pemerintah Prov dan Kab/Kota se-Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen penyusunan formasi ASN	15 dokumen	56.658.900	
	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional yang ditetapkan	1 keputusan gubernur	124.863.000	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional yang ditetapkan	1 dokumen	42.199.800	
	Fasilitasi dan Verifikasi Penyusunan ABK dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen penyusunan ABK dilingkungan Prov. Kalbar yang dilakukan verifikasi	5 dokumen	124.182.000	Fasilitasi dan Verifikasi Penyusunan ABK dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen penyusunan ABK dilingkungan Prov. Kalbar yang dilakukan verifikasi	9 dokumen	76.834.300	
	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024	Pontianak	Jumlah dokumen Road Map Reformasi birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar 2019-2024 yang disusun	1 dokumen	124.969.400	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024	Pontianak	Jumlah dokumen Road Map Reformasi birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar 2019-2024 yang disusun	1 dokumen	80.165.900	
	Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan diligkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Prosentase Perangkat Daerah/UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang menyusun dan menyampaikan Dokumen ANJAB	80%	143.313.000	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan diligkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Dokumen Anjab Perangkat Daerah Provinsi	12 Dokumen	121.970.850	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ASN diligkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan ASN dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang disusun	10 dokumen	136.329.650	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi diligkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen standar kompetensi JPT dilingkungan Pemprov. Kalbar	27 dokumen	104.078.500	
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan ASN Kab/Koa se-Kalbar	Pontianak	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monev penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan ASN	11 Kab/kota	116.65.850	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan ASN Kab/Koa se-Kalbar	Pontianak	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monev penyusunan ANJAB dan Standar Kompetensi Jabatan ASN	11 Kab/kota		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Frekuensi kegiatan peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur setda prov. Kalbar	1 Tahun	90.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Frekuensi kegiatan peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur setda prov. Kalbar	1 Tahun	108.930.000	
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Frekuensi kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan setda prov. Kalbar	1 Tahun	80.000.000	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diproses	9 Dokumen	95.608.700	
	Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah pengunjung perpustakaan Setda Prov. Kalbar dalam 1 tahun	150 orang	145.767.000	Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah pengunjung perpustakaan Setda Prov. Kalbar dalam 1 tahun	100 orang	38.449.700	
	-	-	-	-	-	Monev pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dalam Daerah	Jumlah Laporan Monev RB Kab/Kota	4 Kab/Kota	68.283.700	
	-	-	-	-	-	Verifikasi Penyusunan SKJ Administrasi dilingkungan Pemprov. Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah dokumen SKJ Administrasi dilingkungan Pemprov. Kalbar	10 Dokumen SKJ	105.143.100	
	-	-	-	-	-	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	1 Kali	18.879.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Ctt Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	**Pengembangan Pengawasan dan Akutabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Peningkatan Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**		**345.000.000**	**Pengembangan Pengawasan dan Akutabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Peningkatan Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**		**405.740.100**	
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar tahun 2018 yang disusun	1 dokumen	98.800.000	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar	1 dokumen	78.399.000	
	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen Perjanjian kinerja pemerintah prov. Kalbar tahun 2019 yang disusun	1 dokumen	57.000.000	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah dokumen Perjanjian kinerja pemerintah prov. Kalbar	1 dokumen	23.050.000	
	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah OPD dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang dilakukan asistensi terkait dengan penyusunan laporan kinerja tahun 2018 dan perjanjian kinerja tahun 2019	45 Perangkat Daerah	36.400.000	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak	Jumlah PD yang mengikuti asistensi penyusunan LKj dan Perjankin	37 Perangkat Daerah	36.400.000	
	Pembinaan Penerapan SAKIP di daerah	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang Menerapankan SAKIP dengan baik dan benar	9 kab/kota	82.800.000	Pembinaan Penerapan SAKIP di daerah	Prov. Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang telah dibina	5 kab/kota	94.147.200	
	Workhsop penyusunan cascading kinerja Perangkat Daerah dilingkungn Pemerintah Prov.Kalbar	Prov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Kalbar yang menyusun cascading knerja denga baik dan benar	35 Peragkat Daerah	70.000.000	Workhsop penyusunan cascading kinerja Perangkat Daerah dilingkungn Pemerintah Prov.Kalbar	-	-	-	-	
	-	-	-	-		Workshop SAKIP	Pontianak	Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop SAKIP	45 PD	173.743.900	
	Jumlah Seluruhnya				**4.500.000.000**					**3.337.059.950**	

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi selama ini tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 disusun dalam rangka untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah degan kebijakan pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Ada 7 (tujuh) fokus yang menjadi program prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020, yaitu :

1). Meningkatkan Derjat Kesejahteraan Masyarakat.
2). Meningkatkan kecerdasan Sumber Daya Manusia.
3). Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4). Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
5). Meningkatkan Pembangunan Infstruktur Dasar.
6). Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan.
7). Meningkatkan Pemerataan Pembanguna, Keadilan, Aman, Damai serta Ketahanan Budaya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BIRO ORGANISASI

1. TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk *kuantitatif*, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan (LAN-RI, 2003:9).

Penetapan tujuan didasarkan pada faktor kunci keberhasilan (analisis SWOT: *Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Biro Organisasi. Tujuan organisasi dilaksanakan secara konsisten dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi berdasarkan prinsip kolektifitas, disertai menggambarkan arah strategi instansi dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factor)* dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Untuk itu telah ditetapkan 4 (empat) tujuan strategis, yaitu :

1. Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
2. Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4. Meningkatkan penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

2. SASARAN.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu dalam sasaran, dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.

Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Untuk itu Biro Organisasi telah menetapkan 5 (lima) sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perangkat Daerah yang ditata sesuai kebutuhan
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Prov. Kalbar.
3. Meningkatnya kualitas standarisasi, sistem dan prosedur ditingkat perangkat daerah.
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
5. Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan Akuntabilitas Kinerja di Prov. Kalbar.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun 2019 pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari :
   a. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
   b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Makanan dan Minuman.
   e. Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah.
   f. Penataan dan Pemeliharan Kearsipan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari :
   a. Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor
   b. Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga
   c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi
   d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jabatan, Kendaraan dinas/operasional.
   e. Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin.
   f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor.
   g. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Pertemuan / Aula.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang teridiri dari :
   a. Penyusunan Penetapan Kinerja

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri dari :
   a. Penyusunan Laporan Keuangan.
   b. Penyusunan LAKIP.
   c. Penyusunan RENJA SKPD.
   d. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
   e. Penyusunan RKA dan DPA SKPD.
   f. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

5. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, yang terdiri dari :
   a. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset.

6. Program Pegembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari :
   a. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar
   b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar
   c. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
   d. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   e. Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah
   f. Workshop SAKIP

7. Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
   a. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
   b. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar
   c. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan UPT dilingkungan Provinsi Kalbar
   d. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar.
   e. Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota.
   f. Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota
   g. Koordinasi Tingkat Nasional dibidang Kelembagaan Perangkat Daerah.
   h. Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar
   i. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar
   j. Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   a. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat.
   b. Inovasi Pelayanan Publik.
   c. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov. Kalbar
   d. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov. Kalbar
   e. Penyusunan Pergub tentang Kode Etik Pelayanan Publik.
   f. Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

g. Bimtek Survey Kepuasan Masyarakat.

9. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
   a. Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Ketatalaksanaan.
   b. Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota
   c. Penyusunan Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas
   d. Asistensi Penyusunan SOP UPT/ Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Kalbar
   e. Sosialisasi Peta Proses Bisnis.
   f. Penyusunan Peta Proses Bisnis

10. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, yang terdiri dari :
   a. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional (Jafung) di Lingkungan Pemprov. Kalbar
   b. Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan) di Provinsi Kalbar
   c. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda Prov. Kalbar
   d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kab/Kota
   e. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar
   f. Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Perangkat Daerah/Biro/UPT
   g. Forum Koordinasi Tim Kerja RB Pemprov Kalbar
   h. Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
   i. Penyusunan Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
   j. Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   a. Pembinaan Mental/Spiritual di Lingkungan Setda Prov. Kalbar
   b. Pendidikan dan Pelatihan
   c. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop
   d. Pembinaan Jasmani di Lingkungan Setda Prov. Kalbar

12. Program Program Pengembangan Dan Pengelolaan Bahan Pustaka
   a. Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar

Rumusan rencana Program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 dituangkan dalam tabel berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : (3.07.01) BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	**PENUNJANG**				**4.950.000.000**				**5.243.859.367**
3.07	**SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ORGANISASI**				**4.950.000.000**				**5.243.859.367**
3.07.01	**BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR**				**4.950.000.000**				**5.243.859.367**
3.07.01.01	**BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR**				**4.950.000.000**				**5.243.859.367**
3.07.01.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah**			**356.287.700**				**413.264.840**
3.07.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	Pontianak	4 unit	3.500.000	DAU		4 unit	3.500.000
3.07.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pontianak	1 tahun	4.125.000	DAU		1 tahun	4.537.500
3.07.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	Pontianak	20800 lembar	6.864.000	DAU		21500 lembar	7.550.400
3.07.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minuman	Pontianak	660 Porsi (Snack Box + Nasi Kotak)	33.000.000	DAU		12 bulan	36.300.000
3.07.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Daerah	1 tahun	240.860.400	DAU		1 tahun	264.946.440
3.07.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah pemeliharaan dan penataan arsip	Pontianak	12 bulan	67.938.300	DAU		12 bulan	96.430.500
3.07.01.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA**	**Prosentase peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran**			**374.969.100**				**202.592.100**
3.07.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan / peralatan kantor	Pontianak	9 unit notebook; 10 unit printer; dan 3 unit AIO PC	155.721.700	DAU		1 paket	75.000.000
3.07.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga yang diadakan	Pontianak	1 Unit Lemari Es/Kulkas + Pengadaan Karpet	51.776.900	DAU			0
3.07.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Pontianak	1 Unit	37.660.000	DAU		100%	45.000.000

3.07.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Pontianak	4 unit	56.970.500	DAU		4 unit	40.968.100
3.07.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara	Pontianak	11 unit	11.880.000	DAU		11 unit	13.068.000
3.07.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara	Pontianak	62 unit	25.960.000	DAU		62 unit	28.556.000
3.07.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Jumlah gedung pertemuan / aula yang dilakukan pemeliharaan	Pontianak	1 aula/ruang rapat	35.000.000	DAU			0
3.07.01.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Prosentase ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			**18.974.700**				**20.872.400**
3.07.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30	0	DAU		35	0
3.07.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop.		65	0	DAU		71	0
3.07.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani pada setiap pelaksanaannya		1400 (@40)	0	DAU		1540 (@44)	0
3.07.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Biro yang tersusun	Pontianak	1 dokumen	18.974.700	DAU		1 dokumen	20.872.400
3.07.01.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Prosentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan**			**173.258.000**				**190.400.500**
3.07.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan dan tahunan yang tersusun	Pontianak	1 dokumen	31.023.000	DAU		1 dokumen	34.125.000
3.07.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2019 yang tersusun	Pontianak	1 dokumen	13.440.000	DAU		1 dokumen	14.784.000
3.07.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah dokumen Renja Biro Tahun 2021 yang tersusun	Pontianak	1 dokumen	25.850.000	DAU		1 dokumen	28.435.000
3.07.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ tahun 2019 yang tersusun	Pontianak	2 dokumen	21.363.000	DAU		1 dokumen	23.499.300
3.07.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA Tahun 2021 yang tersusun	Pontianak	2 dokumen	24.022.000	DAU		2 dokumen	26.242.200
3.07.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelayanan terhadap permintaan data/informasi pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	Pontianak	1 tahun	57.560.000	DAU		1 tahun	63.315.000
3.07.01.01.07	**PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH**	**Prosentase peningkatan pelaproan dan inventarisasi aset Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar**			**13.554.000**				**14.909.400**
3.07.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset Biro yang tersusun	Pontianak	1 dokumen	13.554.000	DAU		1 dokumen	14.909.400
3.07.01.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN**	**Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah di reviu; Prosentase Peningkatan Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah**			**545.340.500**				**662.028.212**
3.07.01.01.15.01	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen laporan kinerja Pemprov. Kalbar	Pontianak	1 Dokumen	110.905.000	DAU		1 Dokumen	108.859.620
3.07.01.01.15.02	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar	Jumlah dokumen perjanjian kinerja Pemprov. Kalbar	Pontianak	1 Dokumen	23.950.000	DAU		1 Dokumen	33.192.000
3.07.01.01.15.03	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti asistensi penyusunan Laporan KInerja dan Perjanjian Kinerja	Pontianak	46 Perangkat Daerah	98.256.000	DAU		37 Perangkat	108.190.620

	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat							Daerah	
3.07.01.01.15.04	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring dan di evaluasi	Pontianak	46 Perangkat Daerah	48.246.000	DAU		37 Perangkat Daerah	57.500.000
3.07.01.01.15.05	Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalbar dan Kab/Kota yang dibina terkait penerapan SAKIP	Provinsi Kalimantan Barat	5 Kab/Kota	109.103.000	DAU		5 Kab/Kota	124.509.672
3.07.01.01.15.06	Workshop SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti workshop SAKIP	Pontianak	46 Perangkat Daerah	154.880.500	DAU		160 org	229.776.300
3.07.01.01.16	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**	**Prosentase peningkatan penataan kelembagaan pemerintah daerah yang tepat struktur dan fungsi**			**730.129.900**				**865.509.840**
3.07.01.01.16.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Barat	9 Perangkat Daerah	53.840.000	DAU		15 Perangkat Daerah	55.000.000
3.07.01.01.16.02	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Provinsi Kalimantan Barat	15 Perangkat Daerah	62.505.500	DAU		15 Perangkat Daerah	56.100.000
3.07.01.01.16.03	Monitoring dan Evaluasi kelembagaan UPT di lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah UPT yang dilakukan monitoring dan evaluasi	Provinsi Kalimantan Barat	23 UPT	55.940.000	DAU		15 UPT	55.000.000
3.07.01.01.16.04	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat	Pontianak	65 peserta	152.325.000	DAU		80 peserta	222.750.000
3.07.01.01.16.05	Pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	Provinsi Kalimantan Barat	14 Kab/Kota	103.145.200	DAU		14 Kab/kota	113.459.720
3.07.01.01.16.06	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian penataan perangkat daerah	Provinsi Kalimantan Barat	14 kab/kota	98.679.200	DAU		14 kab/kota	113.200.120
3.07.01.01.16.07	Koordinasi Tingkat Nasional di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan koordinasi tingkat nasional di bidang kelembagaan perangkat daerah	Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	0	DAU		1 Laporan	45.000.000
3.07.01.01.16.08	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah UPT yang dilakukan Penataan	Provinsi Kalimantan Barat	2 Rapergub UPT	69.840.000	DAU		2 Rapergub UPT	65.000.000
3.07.01.01.16.09	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah provinsi dan kab/kota yang terintegrasi			0	DAU			0
3.07.01.01.16.10	Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Perda Perangkat Daerah yang dirubah			0	DAU			0
3.07.01.01.16.11	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	Jumlah Rapergub Tupoksi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang disusun	Provinsi Kalimantan Barat	2 Rapergub	50.180.000	DAU		2 Rapergub	55.000.000
3.07.01.01.16.12	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas	Jumlah Pergub tentang Pembentukan Cabang Dinas			0	DAU			0

3.07.01.01.16.13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundag-undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Barat	47 Perangkat Daerah Provinsi dan 14 Kab/Kota	83.675.000	DAU		Perangkat Daerah Provinsi dan 14 Kab/Kota	85.000.000
3.07.01.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**			**686.371.400**				**785.018.900**
3.07.01.01.17.01	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Pontianak dan Luar Daerah	1 laporan	54.438.700	DAU		1 laporan	62.604.500
3.07.01.01.17.02	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Pemprov. Kalbar	Provinsi Kalimantan Barat	13 inovasi	157.879.500	DAU		17 inovasi	181.561.400
3.07.01.01.17.03	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik di Lingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah PD/UPT dan Biro yang dimonitoring dan dievaluasi	Dalam dan Luar Daerah	114 PD/UPT/Biro	186.230.000	DAU		114 PD/UPT/Biro	214.164.500
3.07.01.01.17.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov.Kalbar	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik melalui kunjungan langsung	Provinsi Kalimantan Barat	6 Kab/Kota	70.645.500	DAU		1 laporan	81.242.500
3.07.01.01.17.05	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pelayanan Publik	Jumlah kebijakan tentang kode etik Palayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	1 Pergub	69.831.700	DAU		1 Pergub	76.000.000
3.07.01.01.17.07	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Dalam dan Luar Daerah	250 org	75.933.000	DAU		275 org	87.323.000
3.07.01.01.17.08	Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Barat	250 org	71.413.000	DAU		275 org	82.123.000
3.07.01.01.17.09	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen Laporan	0	DAU			0
3.07.01.01.18	**PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN**	**Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur**			**551.924.500**				**487.267.775**
3.07.01.01.18.02	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penataan ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Kab/Kota Prov. Kalbar	5 laporan	68.655.500	DAU		6 laporan	78.953.825
3.07.01.01.18.03	Penyusunan Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	Jumlah kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	87.200.000	DAU		1 Laporan	75.000.000
3.07.01.01.18.04	Asistensi Penyusunan SOP UPT/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase UPT/Perangkat Daerah yang menyusun SOP	Pontianak	100%	127.273.000	DAU		100%	146.363.950
3.07.01.01.18.05	Sosialisasi Peta Proses Bisnis	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi	Provinsi Kalimantan Barat	46 Perangkat Daerah	83.896.000	DAU		71 UPT	123.450.000
3.07.01.01.18.06	Penyusunan Kebijakan tentang Jam Kerja	Jumlah kebijakan tentang jam kerja			0	DAU		1 Dokumen	63.500.000
3.07.01.01.18.07	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas	Jumlah Pergub Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	Pontianak	1 Peraturan Gubernur	71.500.000	DAU			0
3.07.01.01.18.08	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas			0	DAU			0
3.07.01.01.18.09	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Dokumen Peta Proses Bisnis	Pontianak	1 Dokumen	113.400.000	DAU			0

3.07.01.01.18.13	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal			0	DAU			0
3.07.01.01.18.14	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan survei kepuasan masyarakat			0	DAU			0
3.07.01.01.18.15	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Publik se-Kalbar			0	DAU			0
3.07.01.01.18.16	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik			0	DAU			0
3.07.01.01.18.17	Penyusunan Pergub tentang Pakaian Dinas	Jumlah Pergub Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar			0	DAU			0
3.07.01.01.18.18	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata naskah dinas			0	DAU			0
3.07.01.01.18.19	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah / UPT yang di monitoring dan evaluasi			0	DAU			0
3.07.01.01.19	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur**			**967.350.950**				**926.056.700**
3.07.01.01.19.01	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Formasi Jabatan Fungsional (Jafung)	Pontianak	1 Dokumen	72.282.700	DAU		1 Dokumen	121.000.000
3.07.01.01.19.02	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah dokumen anjab perangkat daerah/biro/upt yang telah diverifikasi	Dalam dan Luar Daerah	24 Dokumen	120.380.200	DAU		24 Dokumen	134.167.000
3.07.01.01.19.03	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diproses	Pontianak	7 Dokumen	97.701.200	DAU		7 Dokumen	110.745.800
3.07.01.01.19.04	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kab/Kota	Jumlah Kab/kota yang di-monev	Provinsi Kalimantan Barat	9 kab/kota	108.776.700	DAU		14 kab/kota	88.000.000
3.07.01.01.19.05	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah Standar Kompetensi JPT	Pontianak	14 dokumen	52.814.900	DAU		10 dokumen	114.486.400
3.07.01.01.19.06	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Verifikasi Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Fungsional Perangkat Daerah/Biro/UPT	Pontianak	26 Dokumen SKJ	115.460.800	DAU		26 Dokumen SKJ	115.657.500
3.07.01.01.19.07	Penyusunan Kebutuhan ASN	Jumlah dokumen kebutuhan ASN	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	0	DAU		1 dokumen	121.000.000
3.07.01.01.19.08	Pemutakhiran Database Formasi PNS pada Aplikasi e-Formasi	Jumlah Database	Pontianak	1 Database	0	DAU		1	0
3.07.01.01.19.09	Verifikasi Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				0	DAU			0
3.07.01.01.19.10	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Perangkat daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	Provinsi	10 Perangkat	85.046.650	DAU		1	121.000.000

	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		Kalimantan Barat	Daerah					
3.07.01.01.19.11	Workshop/Bimtek Penyusunan Anjab	Jumlah peserta workshop/bimtek penyusunan anjab			0	DAU			0
3.07.01.01.19.12	Workshop/Bimtek Penyusunan ABK	Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Penyusunan ABK			0	DAU			0
3.07.01.01.19.13	Workshop/Bimtek Penyusunan Evjab	Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Penyusunan Evjab			0	DAU			0
3.07.01.01.19.14	Workshop/Bimtek Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Pesertra Workshop/Bimtek Standar Kompetensi Jabatan			0	DAU			0
3.07.01.01.19.15	Asistensi Penyusunan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah peserta asistensi penyusunan kebutuhan ASN			0	DAU			0
3.07.01.01.19.16	Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Pontianak	228 peserta	111.612.400	DAU			0
3.07.01.01.19.17	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar periode 2019-2024	Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar			0	DAU			0
3.07.01.01.19.18	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Jumlah dokumen penyusunan standar kompetensi jabatan administrasi di lingkungan pemerintah prov. kalbar yang telah diverifikasi			0	DAU			0
3.07.01.01.19.19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prov. Kalbar	Pembinaan Jasmani ASN di lingkungan Setda Prov. Kalbar			0	DAU			0
3.07.01.01.19.20	Penyusunan Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Formasi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	1 Dokumen	86.268.000	DAU			0
3.07.01.01.19.21	Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen ABK di lingkungan Pemprov. Kalbar yang diverifikasi	Provinsi Kalimantan Barat	12 Dokumen	117.007.400	DAU			0
3.07.01.01.19.22	Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat				0	DAU			0
3.07.01.01.19.38	Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Jumlah pengunjung perpustakaan Setda Prov. Kalbar			0	DAU			0
3.07.01.01.19.45	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar			0	DAU			0
3.07.01.01.19.56	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				0	DAU			0
3.07.01.01.20	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Persentase ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**			**468.197.250**				**600.932.700**

3.07.01.01.20.01	Pembinaan Mental/Spiritual di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental/spiritual	Provinsi Kalimantan Barat	45 PNS	88.136.200	DAU		50	96.247.200
3.07.01.01.20.02	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah PNS Setda yang menguti Diklat	Dalam dan Luar Daerah	30 PNS	180.000.000	DAU		35 PNS	198.000.000
3.07.01.01.20.03	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Sosilisasi, Bimtek dan Workshop	Dalam dan Luar Daerah	40 PNS	70.807.750	DAU		71 PNS	178.200.000
3.07.01.01.20.04	Pembinaan Jasmani di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Jumlah Peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani pada setiap pelaksanaannya	Pontianak	1980 (60x33)	129.253.300	DAU		1540 (@44)	128.485.500
3.07.01.01.20.05	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar				0	DAU			0
3.07.01.01.21	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA**	**Persentase Peningkatan pengelolaan bahan pustaka**			**63.642.000**				**75.006.000**
3.07.01.01.21.01	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Jumlah bahan pustaka yang telah diolah	Pontianak	50 buku	63.642.000	DAU		55 buku	75.006.000
3.07.01.01.21.02	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Kalbar				0	DAU			0
3.07.01.01.21.03	Pengolahan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Setda Prov. Kalbar				0	DAU			0
3.07.01.01.21.04	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar				0	DAU			0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan rencana Program dan Kegiatan tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) disinkronkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Sekretriat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur terpilih.

Rencana program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dapat dilihat pada daftar lampiran Rencana Kerja (RENJA) ini.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : (3.07.01) BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Target Indikator Program	Indikator Keluaran	Target Keluaran	Indikator Hasil	Target Hasil	Sumber Dana	Pagu	Lokasi	Catatan Asistensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**PENUNJANG**								**4.950.000.000**			
3.07	**SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ORGANISASI**								**4.950.000.000**			
3.07.01	**BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR**								**4.950.000.000**			
3.07.01.01	**BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR**								**4.950.000.000**			
3.07.01.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD**							**356.287.700**			
3.07.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	4 unit	Prosentase pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	100%	DAU	3.500.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 tahun	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 tahun	DAU	4.125.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		Jumlah dokumen yang digandakan	20800 lembar	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	DAU	6.864.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		Jumlah makan dan minuman	660 Porsi (Snack Box + Nasi Kotak)	Persentase jumlah makan dan minuman	100%	DAU	33.000.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	1 tahun	Prosentase keikutsertaan dalam koordinasi dan konsultasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi	100%	DAU	240.860.400	Dalam dan Luar Daerah		Terima

3.07.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD		Jumlah pemeliharaan dan penataan arsip	12 bulan	Prosentase arsip yang terpelihara dan tertata dalam Record Center	100%	DAU	67.938.300	Pontianak		Terima
3.07.01.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA**	**Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor**							**374.969.100**			
3.07.01.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah perlengkapan / peralatan kantor	9 unit notebook; 10 unit printer; dan 3 unit AIO PC	Prosentase perlengkapan/peralatan kantor yang diadakan	100%	DAU	155.721.700	Pontianak		Ditolak
3.07.01.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah perlengkapan / peralatan rumah tangga yang diadakan	1 Unit Lemari Es/Kulkas + Pengadaan Karpet	Persentase pengadaan perlengkapan / peralatan rumah tangga.	100%	DAU	51.776.900	Pontianak		Ditolak
3.07.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Unit	Berjalannya Aplikasi Manajemen Kepegawaian Setda Prov. Kalbar	100%	DAU	37.660.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4 unit	Prosentase kendaraan jabatan, kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan / perawatan	100%	DAU	56.970.500	Pontianak		Terima
3.07.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah AC yang terpelihara	11 unit	Prosentase AC yang dilakukan pemeliharaan rutin	100%	DAU	11.880.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang terpelihara	62 unit	Prosentase peralatan/perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan/perawatan	100%	DAU	25.960.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.02.48	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan / Aula	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah gedung pertemuan / aula yang dilakukan pemeliharaan	1 aula/ruang rapat	Presentase gedung pertemuan/aula yang dilakukan pemeliharaan/perawatan	100%	DAU	35.000.000	Pontianak		Ditolak
3.07.01.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**							**18.974.700**			
3.07.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30			DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop.	65			DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani pada setiap pelaksanaannya	1400 (@40)			DAU	0			Ditolak

3.07.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja Biro yang tersusun	1 dokumen	Tersedianya dokumen penetapan kinerja Biro	1 dokumen	DAU	18.974.700	Pontianak		Terima
3.07.01.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu**							**173.258.000**			
3.07.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		Jumlah dokumen laporan keuangan triwulan dan tahunan yang tersusun	1 dokumen	Prosentase penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	DAU	31.023.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		Jumlah dokumen Laporan Kinerja Biro Tahun 2019 yang tersusun	1 dokumen	Prosentase capaian kinerja Biro Organisasi	100%	DAU	13.440.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		Jumlah dokumen Renja Biro Tahun 2021 yang tersusun	1 dokumen	Prosentase program kerja yang dapat diakomodir dari Renstra	100%	DAU	25.850.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ tahun 2019 yang tersusun	2 dokumen	Prosentase Laporan LPPD dan LKPJ yang disampaikan tepat waktu	100%	DAU	21.363.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		Jumlah dokumen RKA dan DPA Tahun 2021 yang tersusun	2 dokumen	Prosentase kegiatan yang sesuai dengan Renja	100%	DAU	24.022.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu		Pelayanan terhadap permintaan data/informasi pada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar	1 tahun	Terpenuhinya pelayanan terhadap permintaan data/informasi	100%	DAU	57.560.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.07	**PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**13.554.000**			
3.07.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah dokumen Laporan Inventarisasi Aset Biro yang tersusun	1 dokumen	Tersedianya dokumen laporan Inventarisasi Aset Biro	1 dokumen	DAU	13.554.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.15	**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Prosentase laporan kinerja**							**545.340.500**			

	PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN	**dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu**										
3.07.01.01.15.01	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar	Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu		Jumlah Dokumen laporan kinerja Pemprov. Kalbar	1 Dokumen	Prosentase Capaian Kinerja yang memenuhi target	100%	DAU	110.905.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.15.02	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar	Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu		Jumlah dokumen perjanjian kinerja Pemprov. Kalbar	1 Dokumen	Persentase SKPD Pemprov yang menyusun Perjankin dengan baik	100%	DAU	23.950.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.15.03	Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu		Jumlah perangkat daerah yang mengikuti asistensi penyusunan Laporan KInerja dan Perjanjian Kinerja	46 Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah direviu LKJ dan Perjankin	100%	DAU	98.256.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.15.04	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu		Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring dan di evaluasi	46 Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah di monitoring dan di evaluasi	100%	DAU	48.246.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.15.05	Pembinaan Penerapan SAKIP di Daerah	Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu		Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalbar dan Kab/Kota yang dibina terkait penerapan SAKIP	5 Kab/Kota	Persentase Pemerintah Kab/Kota yang telah dibina	100%	DAU	109.103.000	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.15.06	Workshop SAKIP	Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direviu		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti workshop SAKIP	46 Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SAKIP di lingkungan Pemprov. Kalbar	100%	DAU	154.880.500	Pontianak		Terima
3.07.01.01.16	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH**	**Jumlah Perangkat Daerah yang ditata**							**730.129.900**			
3.07.01.01.16.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	9 Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang terfasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	DAU	53.840.000	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.16.02	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	15 Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	100%	DAU	62.505.500	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.16.03	Monitoring dan Evaluasi kelembagaan UPT di lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah UPT yang dilakukan monitoring dan evaluasi	23 UPT	Persentase UPT yang dilakukan monitoring dan evaluasi	100%	DAU	55.940.000	Provinsi Kalimantan Barat		Terima

3.07.01.01.16.04	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat	65 peserta	Laporan rekomendasi hasil rapat koordinasi Bidang Organisasi se-Kalbar	1 Laporan Rekomendasi	DAU	152.325.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.16.05	Pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	14 Kab/Kota	Laporan pembinaan penataan perangkat daerah Kab/Kota	1 Laporan	DAU	103.145.200	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.16.06	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian penataan perangkat daerah	14 kab/kota	Laporan pelaksanaan pengendalian penataan perangkat daerah Kab/Kota	1 Laporan	DAU	98.679.200	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.16.07	Koordinasi Tingkat Nasional di bidang Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah laporan koordinasi tingkat nasional di bidang kelembagaan perangkat daerah	1 Laporan	Persentase laporan koordinasi tingkat nasional di bidang kelembagaan perangkat daerah	100%	DAU	0	Provinsi Kalimantan Barat		Ditolak
3.07.01.01.16.08	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah UPT yang dilakukan Penataan	2 Rapergub UPT	Persentase jumlah UPT yang dilakukan Penataan	100%	DAU	69.840.000	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.16.09	Penyusunan Sistem Informasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah perangkat daerah provinsi dan kab/kota yang terintegrasi				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.16.10	Perubahan dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah Perda Perangkat Daerah yang dirubah				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.16.11	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah Rapergub Tupoksi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang disusun	2 Rapergub	Persentase Rapergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar yang disusun	100%	DAU	50.180.000	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.16.12	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah Pergub tentang Pembentukan Cabang Dinas				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.16.13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundag-undangan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	47 Perangkat Daerah Provinsi dan 14 Kab/Kota	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang disosialisasikan di Bidang Organisasi Perangkat Daerah	1 Peraturan Perundang-undangan	DAU	83.675.000	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.17	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Pemerintah Provinsi Kalbar**							**686.371.400**			
3.07.01.01.17.01	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar		Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 laporan	Prosentase Perangkat Daerah yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Provinsi Kalbar	100%	DAU	54.438.700	Pontianak dan Luar Daerah		Terima
3.07.01.01.17.02	Inovasi Pelayanan Publik	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Pemprov. Kalbar	13 inovasi	Jumlah perserta kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Kalbar	20 Inovasi	DAU	157.879.500	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.17.03	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik di	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar		Jumlah PD/UPT dan Biro yang dimonitoring dan dievaluasi	114 PD/UPT/Biro	Prosentase PD/Biro/UPT yang menerapkan penyelenggaraan pelayanan publikyang	100%	DAU	186.230.000	Dalam dan Luar Daerah		Terima

	Lingkungan Pemprov. Kalbar					baik (kepatuhan tinggi/zona hijau)						
3.07.01.01.17.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Prov.Kalbar	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik melalui kunjungan langsung	6 Kab/Kota	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota	1 Laporan	DAU	70.645.500	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.17.05	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pelayanan Publik	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar		Jumlah kebijakan tentang kode etik Palayanan Publik	1 Pergub	Persentase Perangkat Daerah yang diberikan dokumen mengenai kebijakan tentang kode etik pelayanan publik	100 %	DAU	69.831.700	Dalam dan Luar Daerah		Terima
3.07.01.01.17.07	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	250 org	Kebijakan pelayanan publik yang disosialisasikan	2 kebijakan	DAU	75.933.000	Dalam dan Luar Daerah		Terima
3.07.01.01.17.08	Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar		Jumlah Peserta Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat	250 org	Nilai IKM Provinsi Kalbar	85 (Baik)	DAU	71.413.000	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.17.09	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar		Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	1 Dokumen Laporan	Prosentase pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Kalbar	100%	DAU	0	Dalam dan Luar Daerah		Ditolak
3.07.01.01.18	**PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN**	**Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur**							**551.924.500**			
3.07.01.01.18.02	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ketatalaksanaan pada Kab/Kota	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penataan ketatalaksanaan pada Kab/Kota	5 laporan	Prosentase Kab/Kota yang menerapkan Standarisasi, Sistem dan Prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	DAU	68.655.500	Kab/Kota Prov. Kalbar		Terima
3.07.01.01.18.03	Penyusunan Kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	1 Dokumen	Persentase kebijakan tentang Tata Naskah Dinas	100%	DAU	87.200.000	Dalam dan Luar Daerah		Terima
3.07.01.01.18.04	Asistensi Penyusunan SOP UPT/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Persentase UPT/Perangkat Daerah yang menyusun SOP	100%	Prosentase tersusunnya SOP pada UPT/PD	100%	DAU	127.273.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.18.05	Sosialisasi Peta Proses Bisnis	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi	46 Perangkat Daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang memahami penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur	80%	DAU	83.896.000	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.18.06	Penyusunan Kebijakan tentang Jam Kerja			Jumlah kebijakan tentang jam kerja				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.18.07	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah Pergub Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	1 Peraturan Gubernur	Persentase Pergub Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	100%	DAU	71.500.000	Pontianak		Terima

3.07.01.01.18.08	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Tata Naskah Dinas				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.18.09	Penyusunan Peta Proses Bisnis	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Dokumen Peta Proses Bisnis	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Peta Proses Bisnis	1 Dokumen	DAU	113.400.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.18.13	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.18.14	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah laporan survei kepuasan masyarakat				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.18.15	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Publik se-Kalbar				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.18.16	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.18.17	Penyusunan Pergub tentang Pakaian Dinas	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah Pergub Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.18.18	Sosialisasi Tata Naskah Dinas	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata naskah dinas				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.18.19	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Pemprov. Kalbar	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur		Jumlah Perangkat Daerah / UPT yang di monitoring dan evaluasi				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19	**PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR**	**Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur**							**967.350.950**			
3.07.01.01.19.01	Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional di	Prosentase perangkat		Jumlah Dokumen Formasi Jabatan	1 Dokumen	Persentase dokumen formasi jabatan	100%	DAU	72.282.700	Pontianak		Terima

	Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Fungsional (Jafung)		fungsional (jafung) yang disusun						
3.07.01.01.19.02	Verifikasi Penyusunan Analisis Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah dokumen anjab perangkat daerah/biro/upt yang telah diverifikasi	24 Dokumen	Persentase draft dokumen Analisis Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang diverifikasi	100%	DAU	120.380.200	Dalam dan Luar Daerah		Terima
3.07.01.01.19.03	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Dokumen Kepegawaian yang diproses	7 Dokumen	Persentase Dokumen Kepegawaian yang diproses	100%	DAU	97.701.200	Pontianak		Terima
3.07.01.01.19.04	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kab/Kota	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Kab/kota yang di-monev	9 kab/kota	Persentase Kab/Kota yang telah di Monitor dan di Evaluasi	75%	DAU	108.776.700	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.19.05	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Standar Kompetensi JPT	14 dokumen	Persentase dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pemprov. Kalbar yang disusun	100%	DAU	52.814.900	Pontianak		Terima
3.07.01.01.19.06	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Provinsi Kalimantan Barat	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Verifikasi Standar Kompetensi Jabatan Administrasi dan Fungsional Perangkat Daerah/Biro/UPT	26 Dokumen SKJ	Persentase dokumen SKJ Administrasi dan Jafung yang telah di verifikasi di lingkungan pemerintah provinsi kalbar	100%	DAU	115.460.800	Pontianak		Terima
3.07.01.01.19.07	Penyusunan Kebutuhan ASN	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah dokumen kebutuhan ASN	1 Dokumen	Tersedianya dokumen kebutuhan ASN Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	DAU	0	Dalam dan Luar Daerah		Ditolak
3.07.01.01.19.08	Pemutakhiran Database Formasi PNS pada Aplikasi e-Formasi	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Database	1 Database	Database Formasi PNS yang telah dimutakhirkan	1 Database	DAU	0	Pontianak		Ditolak
3.07.01.01.19.09	Verifikasi Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah	Prosentase perangkat daerah yang						DAU	0			Ditolak

	Provinsi Kalimantan Barat	telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur										
3.07.01.01.19.10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Perangkat daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	10 Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	100%	DAU	85.046.650	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.19.11	Workshop/Bimtek Penyusunan Anjab	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah peserta workshop/bimtek penyusunan anjab				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19.12	Workshop/Bimtek Penyusunan ABK	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Penyusunan ABK				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19.13	Workshop/Bimtek Penyusunan Evjab	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Peserta Workshop/Bimtek Penyusunan Evjab				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19.14	Workshop/Bimtek Standar Kompetensi Jabatan	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Pesertra Workshop/Bimtek Standar Kompetensi Jabatan				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19.15	Asistensi Penyusunan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah peserta asistensi penyusunan kebutuhan ASN				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19.16	Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Peserta Sosialisasi dan Internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	228 peserta	Persentase peserta sosialisasi dan internalisasi road map RB	100%	DAU	111.612.400	Pontianak		Terima
3.07.01.01.19.17	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov.	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan		Jumlah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kalbar				DAU	0			Ditolak

	Kalbar periode 2019-2024	pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur										
3.07.01.01.19.18	Verifikasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah dokumen penyusunan standar kompetensi jabatan administrasi di lingkungan pemerintah prov. kalbar yang telah diverifikasi				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19.19	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prov. Kalbar	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Pembinaan Jasmani ASN di lingkungan Setda Prov. Kalbar				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19.20	Penyusunan Formasi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Dokumen Formasi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1 Dokumen	Persentase dokumen formasi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	100%	DAU	86.268.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.19.21	Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Dokumen ABK di lingkungan Pemprov. Kalbar yang diverifikasi	12 Dokumen	Persentase draft dokumen Analisis Beban Kerja yang telah diverifikasi	100%	DAU	117.007.400	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.19.22	Verifikasi Penyusunan ABK di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur						DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19.38	Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah pengunjung perpustakaan Setda Prov. Kalbar				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19.45	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur		Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar				DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.19.56	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Prosentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan						DAU	0			Ditolak

		pengembangan sumber daya aparatur										
3.07.01.01.20	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Prosentase PNS Setda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)**							**468.197.250**			
3.07.01.01.20.01	Pembinaan Mental/Spiritual di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental/spiritual	45 PNS	Persentase jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental/spiritual	100%	DAU	88.136.200	Provinsi Kalimantan Barat		Terima
3.07.01.01.20.02	Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah PNS Setda yang menguti Diklat	30 PNS	Prosentase ASN Setda Prov. Kalbar yang menikuti Diklat	100%	DAU	180.000.000	Dalam dan Luar Daerah		Terima
3.07.01.01.20.03	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti Sosilisasi, Bimtek dan Workshop	40 PNS	Prosentase ASN Setda Prov. Kalbar yang mengikuti sosialisasi, bimtek dan workshop	100%	DAU	70.807.750	Dalam dan Luar Daerah		Terima
3.07.01.01.20.04	Pembinaan Jasmani di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah Peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani pada setiap pelaksanaannya	1980 (60x33)	Prosentase peserta yang mengikuti senam kesehatan jasmani	100%	DAU	129.253.300	Pontianak	anggaran di rasionalisasi kembali	Terima
3.07.01.01.20.05	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.21	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA**	**Presentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka**							**63.642.000**			
3.07.01.01.21.01	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Presentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka		Jumlah bahan pustaka yang telah diolah	50 buku	Persentase bahan pustaka yang telah diolah	100%	DAU	63.642.000	Pontianak		Terima
3.07.01.01.21.02	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Kalbar	Presentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka						DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.21.03	Pengolahan Bahan Pustaka pada Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	Presentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka						DAU	0			Ditolak
3.07.01.01.21.04	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional ASN Setda Prov. Kalbar	Presentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka						DAU	0			Ditolak

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 disusun berdasarkan Pagu Indikatif yang disesuaikan dengan Kebutuhan dan Skala Prioritas Program dan Kegiatan. Rencana Kerja yang disusun ini terdiri dari 11 (sebelas) Program dan 65 (enam puluh lima) kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut bersifat rutin/penunjang serta Program dan Kegiatan yang sifatnya Prioritas. Program dan kegiatan rutin/penunjang ada 5 (lima) Program dengan 21 (dua puluh satu) Kegiatan, sedangkan program dan kegiatan prioritas ada 7 (tujuh) Program dengan 44 (empat puluh empat) kegiatan.

Untuk mendukung seluruh program dan kegiatan tersebut diperlukan anggaran sebesar Rp 4.950.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.

Rencana Kerja yang disusun ini masih banyak perlu penyempurnaan baik kegiatan-kegiatan maupun besaran pagu indikatifnya guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja yang disusun dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Pontianak, 2019

KEPALA BIRO ORGANISASI,

MARJANI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660302 198703 1 012